

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, tidak terkecuali negara maju dan berkembang. UMKM berkontribusi atas penyerapan tenaga kerja suatu negara serta menjadi wadah bertumbuhnya ide-ide inovatif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2018, jumlah UMKM terdapat sekitar 64,1 juta unit atau 99,9 persen dari seluruh unit usaha beserta dengan Usaha Besar, lalu UMKM menyerap 116 juta tenaga kerja atau 97 persen tenaga kerja secara keseluruhan (UKM, 2018). UMKM juga tahan banting terhadap krisis global dibandingkan usaha besar. Memperkuat peran sektor ekonomi mikro dapat menjadi alternatif bagi suatu negara untuk mempertahankan kestabilan ekonominya dari ketidakpastian kondisi global yang sangat berdampak pada klasifikasi usaha besar.

Terbukti selama tahun 2017 sampai 2018, UMKM terus tumbuh sebesar 2,02 persen. Dibandingkan dengan Usaha Besar yang hanya tumbuh lebih kecil sebesar 1,64 persen. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga tumbuh sebesar 0,47 persen dari tahun 2017 sampai 2018. Kota Depok sebagai Kota di Jawa Barat dengan total populasi yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta penduduk, masih tertinggal jauh pertumbuhan UMKMinya dibandingkan dengan Kota besar lainnya yang ada di Jawa Barat,

seperti Kota Bogor dan Kota Bekasi (Hamidah et al., 2020). Ini menjadi tantangan bagi Kota Depok untuk memaksimalkan potensi yang ada sebagai Kota penyangga Ibu Kota DKI Jakarta.

Permasalahan sulitnya UMKM untuk bertumbuh dan berkembang adalah karena daya saing serta perkembangan usaha. Banyak pelaku UMKM memiliki keterampilan yang minim dalam hal pemasaran ataupun penggunaan teknologi. Lalu kesulitan UMKM berkembang dikarenakan terbatasnya modal yang ada, sehingga sulit untuk melakukan ekspansi usaha. Akses kredit formal menjadi faktor penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa sebanyak 70 persen UMKM di Indonesia belum tersentuh akses pembiayaan (Detik.com, 2019), yang berarti 7 dari 10 UMKM di Indonesia belum memiliki akses pembiayaan.

Bank Indonesia juga telah membuat kebijakan untuk perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 2 ayat 2 yaitu, bank umum wajib memberikan kredit kepada UMKM paling rendah sebesar 20 persen dari total kredit. Data (B. Indonesia, 2019) pada Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan IV 2018 menunjukkan penyaluran kredit UMKM sebesar 19,9 persen dari total kredit perbankan, mengalami penurunan 0,1 persen dibandingkan Triwulan IV 2017. Penyaluran kredit tersebut sebagian besar disalurkan pada kredit usaha menengah sebesar 44,5 persen. Sedangkan usaha

kecil dan mikro masing-masing hanya sebesar 30,1 persen dan 25,4 persen. Lalu peningkatan kredit pada usaha mikro dan kecil pada Triwulan IV 2018 menurun masing-masing sebesar 12,7 persen dan 10,4 persen (*year on year*) dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 13,6 persen dan 10,8 persen (*year on year*).

Permasalahan sulitnya UMKM untuk mengakses kredit adalah sektor ini masih belum *bankable*, karena masih banyak UMKM yang tidak melakukan pencatatan keuangan secara baik dan benar. Lalu untuk sisi internal, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi usaha dalam tahun berjalan. Sedangkan dari sisi eksternal laporan keuangan merupakan salah satu syarat agunan dari pihak perbankan. Lalu faktor literasi keuangan yang rendah menjadi kendala, banyak dari mereka yang tidak handal mengelola keuangan mereka dan memahami produk-produk keuangan sehingga biasanya mereka meminjam kepada keluarga sendiri ataupun kepada rentenir. Data OJK (2019) menunjukkan, tingkat literasi keuangan di Indonesia meningkat menjadi 38,03 persen dalam kategori *well literate*. Namun Presiden Joko Widodo mengeluhkan tingkat literasi Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, terutama Singapura dan Malaysia (C. Indonesia, 2020). Menurut Greenspan (2002) dalam Anggraeni (2016, pp. 44–45) menyebutkan bahwa “Literasi keuangan akan membantu bagi pelaku usaha terkait pengelolaan usaha dimulai dari anggaran, perencanaan simpan dana usaha, serta pengetahuan dasar atas keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha”.

Kondisi lainnya yang menjadi faktor aksesibilitas kredit UMKM adalah ukuran usaha. Usaha kelas menengah memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan kelas kecil dan mikro. Karena mereka memiliki nilai aset dan juga omset yang lebih besar yang bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan kredit (BPS, 2019, p. 36). Karena banyaknya UMKM yang sulit mengakses bank, akibatnya upaya untuk menaikkan kelas UMKM sulit dilakukan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui standar untuk pelaporan keuangannya. Sehingga UMKM ini mampu menjadi *bankable* di mata perbankan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI juga telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Dengan adanya SAK ETAP, diharapkan mampu digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Namun dikarenakan rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK-ETAP yang masih cukup kompleks, maka penggunaannya belumlah optimal. Maka dari itu DSAK kembali menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK-EMKM) yang lebih sederhana. Standar baru ini efektif berlaku pada 1 Januari 2018. SAK EMKM ini khusus dibuat untuk UMKM yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Dengan begitu, diharapkan dari ada standar ini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor UMKM.

Perbedaan SAK EMKM dengan SAK ETAP adalah pada SAK EMKM hanya terdapat tiga komponen, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya tidak adanya pengakuan penurunan nilai untuk aset ataupun persediaan, namun aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa adanya nilai residu, yang berarti SAK EMKM menggunakan dasar pengukuran unsur laporan keuangan menggunakan biaya historis. Sedangkan pada SAK ETAP terdapat dua pilihan pengukuran, yaitu biaya historis dan nilai wajar.

Dengan standar yang baru berlaku SAK EMKM, Penelitian Nursalim et al. (2019) membuktikan bahwa akuntansi keuangan berbasis SAK EMKM berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Namun Iswoyo et al. (2019) pada penelitiannya menemukan hasil yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit oleh bank. Hal ini disebabkan kebanyakan laporan keuangan UMKM tidak memenuhi standar yang berlaku kini (SAK EMKM), sehingga informasi yang terdapat pada laporan keuangannya tidak dapat menjadi landasan bagi perbankan untuk memberikan kredit. Pada penelitian Mubiroh dan Ruscitasari (2019) juga menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAK EMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kredit, dikarenakan responden pada penelitian tersebut kebanyakan adalah pengusaha mikro yang melakukan pembukuan secara sederhana dan berkualitas rendah. Namun para pelaku UMKM masih dapat menerima pinjaman bank dengan menggunakan jaminan aset yang dimiliki.

Selanjutnya Oktavianti dan Hakim (2017) menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akses kredit formal UMKM di Surabaya, menurutnya akses kredit UMKM didasari perilaku keuangan pemilik usaha yang dipengaruhi oleh literasi keuangan. Hasil tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan Maisyaroh dan Sista P (2018) bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akses kredit formal di daerah Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut memaparkan, semakin tinggi nilai variabel literasi keuangan maka semakin tinggi juga nilai akses kredit formal untuk UMKM.

Sarwani et al (2019) pada penelitiannya menyebutkan ukuran usaha juga menjadi salah satu faktor pihak perbankan untuk menentukan memberikan kredit. Penelitian Zr dan Gurendrawati (2015) menemukan bahwa ukuran usaha berpengaruh signifikan terhadap akses kredit. Didukung pula oleh penelitian Iswoyo et al., (2019) menemukan bahwa semakin besar suatu usaha akan berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit oleh bank. Diana (2019) juga menemukan bahwa skala usaha yang lebih besar semakin besar pula peluang mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Peluang skala usaha yang lebih besar hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan skala usaha yang lebih kecil untuk mendapatkan kredit formal.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu dari variabel literasi keuangan dan ukuran usaha menampilkan hasil yang konsisten, yaitu berpengaruh signifikan terhadap akses kredit UMKM. Peneliti tertarik untuk melakukan verifikasi variabel tersebut pada unit analisis yang berbeda yaitu UMKM di Kota

Depok. Karena sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang menggunakan kedua variabel tersebut secara bersamaan di Kota Depok. Selanjutnya *research gap* yang ditemukan adalah penelitian Dewi Puspa Ayu et al. (2017) menemukan bahwa pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK ETAP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Nursalim et al. (2019) menemukan bahwa akuntansi berbasis SAK EMKM memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.

Penelitian Narsa et al. (2012) menemukan lengkapnya laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga perbankan untuk memberikan akses kredit bagi UMKM. Penelitian (T. Rahmawati & Puspasari, 2017) menemukan implementasi SAK ETAP pada kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap besaran kredit yang diterima UMKM. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan digunakan sebagai salah satu syarat kredit yang diminta oleh pihak perbankan. Namun penelitian Iswoyo et al. (2019) dan Mubiroh dan Ruscitasari (2019) menemukan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM masih sangat rendah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak berpengaruh terhadap akses kredit UMKM. Peneliti tertarik untuk mengetahui, bagaimana pemahaman pelaku UMKM Kota Depok tentang SAK EMKM serta pengaruhnya terhadap akses kredit formal UMKM. Berdasarkan hal yang telah disebutkan, maka peneliti mengajukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pemahaman SAK EMKM, Literasi Keuangan dan Ukuran Usaha terhadap Akses Kredit Formal UMKM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, serta ditemukannya *research gap* yang ditemukan peneliti. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman SAK EMKM berpengaruh terhadap akses kredit formal UMKM di Kota Depok?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap akses kredit formal UMKM di Kota Depok?
3. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap akses kredit formal UMKM di Kota Depok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAK EMKM terhadap akses kredit formal UMKM di Kota Depok
2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap akses kredit formal UMKM di Kota Depok
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran usaha terhadap akses kredit formal UMKM di Kota Depok

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian terdahulu, namun memiliki kebaruan pada variabel, periode waktu dan unit analisis. Tiap-tiap daerah pastinya

memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti kendala yang dihadapi UMKM untuk mengakses kredit.

Penelitian (Mubiroh & Ruscitasari, 2019) meneliti pengaruh implementasi SAK EMKM terhadap penerimaan kredit UMKM, unit analisisnya adalah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian (Iswoyo et al., 2019) menggunakan unit analisis UMKM di Jawa Timur.

Pada penelitian Oktavianti dan Hakim (2017) meneliti pengaruh variabel literasi keuangan terhadap akses kredit formal UMKM, unit analisis pada penelitian ini adalah UMKM di Surabaya. Penelitian Maisyaroh dan Sista P., (2018) juga meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap akses kredit formal UMKM, unit analisis yang digunakan adalah UMKM di Sidoarjo.

Penelitian Iswoyo et al. (2019) menggunakan variabel ukuran usaha dengan indikator nilai perdagangan untuk melihat pengaruhnya terhadap aksesibilitas permodalan UMKM dengan unit analisis UMKM di Jawa Timur. Zr & Gurendrawati (2015) menggunakan variabel ukuran usaha dengan indikator nilai penjualan tahunan dan unit analisis yang diteliti yaitu UMKM di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pembaharuan yang dilakukan, yaitu unit analisis yang diteliti berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu UMKM di Kota Depok. Karena sejauh pengamatan peneliti, belum ada yang melakukan penelitian ketiga variabel tersebut secara bersamaan di Kota Depok.